



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Uang Dinas Malam RSUD Jadi Temuan

Diduga Tanpa Dasar Hukum

CURUP - Pembayaran uang jaga malam untuk tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Curup tahun 2022, dikabarkan menjadi temuan BPK. Angka temuan pun tidak tanggung-tanggung yakni Rp 1,4 miliar untuk pembayaran honor dinas malam sekitar 300 orang nakes bulan Januari - Oktober 2022.

Informasi ini santer tersebar di lingkungan pengawai Pemkab Rejang Lebong. Sebab para nakes dibebankan harus mengembalikan uang dinas malam tersebut sebesar Rp 3,6 juta per nakes yang melaksanakan dinas malam.

Penelusuran RB, besaran honor jaga malam yang dibayarkan kepada para nakes Rp 45 ribu per malam. Setiap nakes melaksanakan 8 kali dinas malam dalam 1 bulan. Adapun untuk pembayarannya dilakukan per bulan via rekening masing-masing nakes, tanpa adanya bukti serah terima yang dibubuhi tanda tangan.

Salah satu nakes RSUD Curup yang enggan dibebankan identitasnya mengatakan, banyak nakes di RSUD tersebut keberatan dengan pengembalian uang dinas malam yang diminta oleh manajemen RSUD Curup. Pasalnya para nakes ber alasan bahwa itu memang hak mereka selaku nakes yang benar-benar menjalankan tugasnya di RSUD Curup.

"Kok kami yang harus mengembalikan? Itu kan hak kami selaku nakes yang memang menjalankan tugasnya. Kalau soal ada atau tidaknya aturan hukum pembayaran honor jaga malam tersebut, harusnya itu jadi tanggung jawab pihak manajemen RSUD. Kalau kami selaku bawahan hanya menjalankan tugas saja," keluh nakes tersebut.

Terkait temuan ini, Direktur RSUD

Curup, dr. Rheyco Viktoria, Sp. An belum bisa dikonfirmasi.

Terpisah, Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Pranoto Majid, SH, MH ketika dimintai tanggapan mengenai informasi yang santer ini, tidak menampik bahwa pihaknya juga sudah menerima informasi tersebut. Hanya saja, ia mengatakan, sejak akhir 2022 lalu BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu memang sudah turun ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan.

"Namanya pemeriksaan pendahuluan, tentu masih umum. Meski demikian memang ada informasi mengenai OPD mana saja yang dikabarkan ada temuan BPK, termasuk di RSUD Curup," terang Pranoto.

Menurutnya, informasi yang berkembang terkait hasil audit pendahuluan di RSUD Curup tersebut hanyalah persoalan administratif

yang harus dibenahi oleh manajemen RSUD khususnya terkait pembayaran honor nakes yang dinas malam. "Tapi nanti bagaimana itu tindaklanjutnya, tentu kita menunggu hasil pemeriksian rinci dari BPK yang sedang dilakukan saat ini," tambahnya.

Lanjut Pranoto, hingga 20 Maret 2023, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu masih melakukan audit terperinci di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan hasil audit terperinci ini nantinya bisa dilihat secara legal dan formal atas kebenaran informasi yang berkembang tersebut.

"Dari hasil audit inilah nantinya bisa diketahui dimana kesalahan RSUD tersebut. Kalau memang harus ada pengembalian, siapa yang mengembalikan, bisa dilihat dari hasil audit. Kalau harus ada perbaikan administratif, dimana kesalahannya itu yang harus diperbaiki," beber Pranoto.(sly)